



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN TOSARI

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN TOSARI TAHUN 2026



**Jl. Tlogosari No. 40 Tosari-Pasuruan
Kode Pos 67177**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

RENCANA KERJA

KECAMATAN TOSARI

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Bab I pasal 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berorientasi pada proses, sehingga dengan adanya perencanaan pembangunan dimaksud maka proses pencapaian tujuan dari pembangunan akan dapat dicapai dengan lebih terarah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah selama periode 5 (lima) tahun dan rencana kerja perangkat daerah selama periode (satu) tahun Rencana kerja (Renja). Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

RENJA Perangkat Daerah tahun 2026 Kecamatan Tosari merupakan Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Untuk mewujudkan rencana tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk tujuan. Sesuai dengan peran Kecamatan Tosari, Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Tosari adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan”** dengan indikator **“Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan”**. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah :

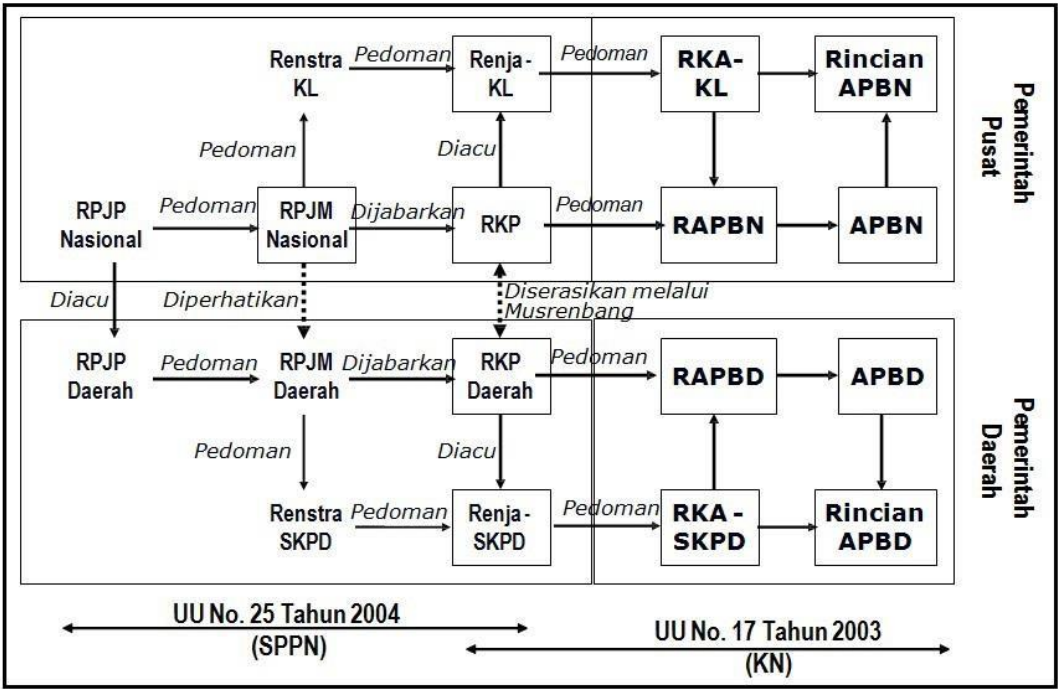
1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Indikator : Persentase Hasil Capaian Penyelenggaraan Kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Tosari Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun atas dasar :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Permendagri 104/2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;

3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2026.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Kecamatan Tosari disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TOSARI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tosari Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Tosari

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tosari. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TOSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentae Dokumen atau Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik atau Sesuai Regulasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokume		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	45 Org/Bln		224 Orang	224 Orang	224 Orang	224 Orang	224 Orang	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokuemn		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	

X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen Barang Milik Daerah yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%		95%	95%	95%	95%	95%	
X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%		95%	95%	95%	95%	95%	
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		12Laporan	12Laporan	12Laporan	12Laporan	12Laporan	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%		90%	90%	90%	90%	90%	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		10 Buah	10 Buah	10 Buah	10 Buah	10 Buah	
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	15 Unit		4 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		6 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu	100%							
		2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	3,50							
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen PeningkatanEfektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%		95%	95%	95%	95%	95%	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Realisasi PBB-P2	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	100%		100%	100%	100%	100%	100%	

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasy.		5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Laporan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	450 Peserta		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450 Peserta		100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	

Tabel 2.1.A				
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025				
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor Pendorong/ Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang	224 Orang	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	95%	95%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	95%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan

				dokumen perencanaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12Laporan	12Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan

			yang baik	pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Buah	10 Buah	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pemeliharaan Mebel	4 Buah	4 Buah	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	6 Buah	6 Buah	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
			Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	95%	95%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan

				dokumen perencanaan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KesatuanRepublik Indonesia	100 orang	100 orang	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Penyusunan perencanaan yang tepat dan kinerja yang baik	Pertahankan pencapaian kinerja dan ketepatan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan

Evaluasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Anggaran belanja/pengeluaran Kecamatan Tosari tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 2.660.845.950,- dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.584.710.202,-. Anggaran PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tosari terbagi menjadi 16 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.584.710.202,- atau 97,14% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Tosari dapat diuraikan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	TAHUN 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.	BELANJA DAERAH	2.660.845.950,-	2.266.595.410,-	96,00
5.1.	BELANJA OPERASIONAL	2.640.865.950,-	2.242.795.410,-	96,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.828.642.400,-	1.552.446.995,-	95,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.223.550,-	690.348.415,-	97,02
5.2.	BELANJA MODAL	19.980.000,-	23.800.000,-	95,71
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.980.000,-	23.800.000,-	95,71
	Jumlah Belanja	2.361.050.610,-	2.266.595.410,-	96,00

Rincian lebih detail mengenai anggaran dan realisasi anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Tosari Tahun 2024 dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Tosari sebagai berikut :

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.460.182.450,00	2.400.795.702,00	97,59%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.445.000,00	4.720.000,00	86,69%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.807.000,00	2.807.000,00	100,00%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.638.000,00	1.913.000,00	72,52%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.042.400,00	2.088.685.705,00	97,74%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.794.082.400,00	1.745.725.705,00	97,30%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	308.400.000,00	308.400.000,00	100,00%
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	34.560.000,00	34.560.000,00	100,00%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00%
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.929.300,00	141.337.885,00	99,58%
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.240.000,00	4.231.000,00	99,79%

5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.355.000,00	3.310.000,00	98,66%
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00%
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.343.000,00	25.310.500,00	99,87%
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.716.300,00	9.710.000,00	99,94%
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.775.000,00	19.323.000,00	97,71%
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.900.000,00	75.853.385,00	99,94%
6.	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.980.000,00	19.900.000,00	99,60%
6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.980.000,00	19.900.000,00	99,60%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.488.250,00	21.704.112,00	78,96%
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.174.250,00	19.390.112,00	77,02%
7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.314.000,00	2.314.000,00	100,00%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.297.500,00	124.448.000,00	97,00%
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.537.500,00	118.448.000,00	97,46%
8.2	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00%
8.3	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	6.760.000,00	6.000.000,00	88,76%
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.219.500,00	55.607.500,00	87,96%
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.594.500,00	51.944.500,00	88,65%
1.1	Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.034.500,00	9.009.500,00	99,72%
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49.560.000,00	42.935.000,00	86,63%
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00%
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00%
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.625.000,00	3.663.000,00	79,20%
3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.625.000,00	3.663.000,00	79,20%
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.060.000,00	22.637.000,00	98,17%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.060.000,00	22.637.000,00	98,17%
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0,00	0,00	0,00%
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.060.000,00	22.637.000,00	98,17%
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00%
2.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0,00	0,00	0,00%
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.514.000,00	59.460.000,00	88,07%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	67.514.000,00	59.460.000,00	88,07%
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	57.240.000,00	50.662.000,00	88,51%
1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	10.274.000,00	8.798.000,00	85,63%

	Masyarakat			
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.940.000,00	39.930.000,00	99,97%
1	Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	39.940.000,00	39.930.000,00	99,97%
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	39.940.000,00	39.930.000,00	99,97%
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	6.930.000,00	6.280.000,00	90,62%
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.930.000,00	6.280.000,00	90,62%
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.490.000,00	2.490.000,00	100,00%
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.440.000,00	3.790.000,00	85,36%
JUMLAH ANGGARAN		2.660.845.950,00	2.584.710.202,00	97,14%

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tosari pada tahun 2024, dalam proses pelaksanaan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA), serta berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan;
- Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tosari dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Tosari dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. a Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan;
 - a. b Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Tosari dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan ,

maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Tugas Kecamatan Tosari adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Tosari mempunyai Fungsi :

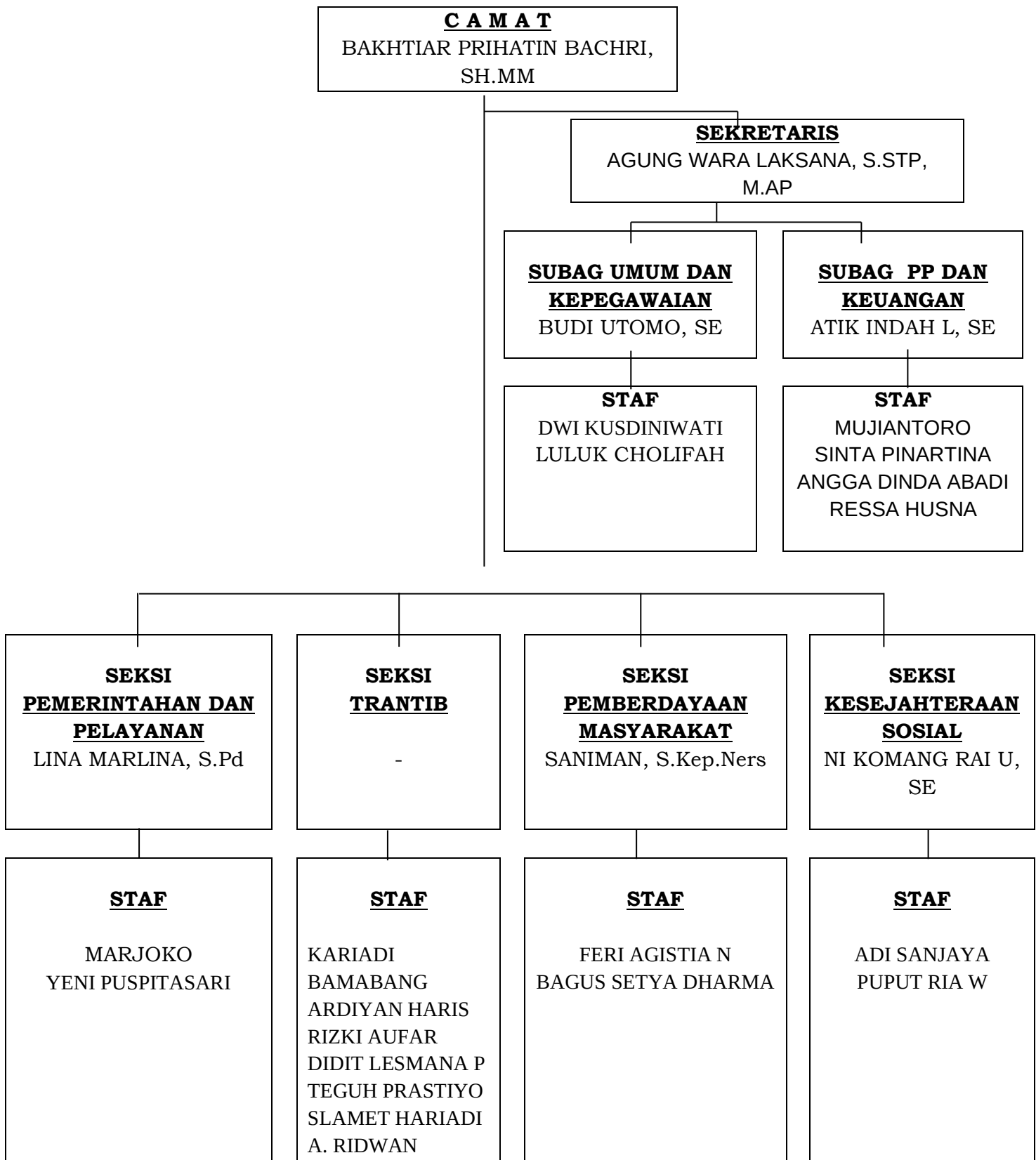
1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Susunan Organisasi Kecamatan Tosari dimaksud terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris Camat
 - a. Subag Umum & Kepegawaian
 - b. Subag Penyusunan Program & Keuangan
- Seksi Pemerintahan & Pelayanan
- Seksi Ketentraman & Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tugas & fungsi kecamatan adalah :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan

pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Sub bagian umum mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub bagian penyusunan program dan keuangan , mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SEKSI PEMERINTAHAN & PELAYANAN

Seksi Pemerintahan & Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koodinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan paeraturan perundang-undangan, penegakan paeartauran perundang-undangan dan/ atau kepolisian negara republik Indonesia;
- e. Menyiapkan bahn pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama , ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana & sarana pelayanan umum;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat , keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisional yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tosari yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, yaitu :

- a. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan
Indikator : Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan.
- b. Sasaran:
 - 1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
Indikator : Persentase Penyelenggaraan Kecamatan.
 - 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Secara rinci, capaian IKU kecamatan Bangil disajikan pada table 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tosari
Kabupaten Pasuruan

[illegible]

	- Nilai Sakip Perangkat Daerah			78.00	73.00	74.00	80.00	72,75	73,00	74.00	74,50	
--	--------------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tosari meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Kecamatan Tosari adalah Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra Kecamatan Tosari maka terkait dengan misi ke empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Tosari harus dilakukan secara profesional, transparan, dan inovatif agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Tosari yang sejahtera.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tosari bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		
MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih belum optimalnya kinerja pemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur
		Kurangnya koordinasi dan sinkronsasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
		Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk
		Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan atau diberikan
Sumber data dan informasi	Data yang diberikan sering kali tidak akurat atau tidak valid	Sumber data yang belum valid karena data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda

Adapun isu-isu penting di Kecamatan Tosari dapat dilihat pada table dibawah ini :

ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN DI KECAMATAN TOSARI

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1.	Pelayanan Publik	1. Belum optimalnya pelayanan yang mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan 3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 4. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah 5. Peningkatan sarana dan prasarana

2.	Sektor ekonomi unggulan	1. Kurang terfasilitasinya sector ekonomi local unggulan dalam hal pelatihan SDM dan pemasaran produk. 2. Kurangnya keterlibatan <i>stakeholder</i> dan pelaku ekonomi terkait. 3. Masih rendahnya peluang pemasaran produk unggulan terutama UMKM 4. Belum meratanya informasi masyarakat terhadap keberadaan UMKM di Kecamatan Tosari
4.	Kualitas lingkungan hidup	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah 2. Kurangnya edukasi dalam pengolahan tanah 3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga maupun sampah pertanian
5.	Infrastruktur	1. Meningkatkan infrastruktur jalan sebagai kelancaran jalur transportasi ekonomi. 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadahi untuk UMKM dibidang pariwisata.
6.	Kependudukan	1. Masih banyaknya pernikahan usia dini sehingga mengakibatkan SDM masyarakat kurang. 2. Masih adanya Stunting di Kecamatan Tosari

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Tosari sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah seperti pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

KECAMATAN TOSARI

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
7 7 01 X XX 01	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tosari	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	3.048.580.636	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tosari	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	2.628.774.016	
X XX 01 2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	18.150.000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100%	17.500.000	
X XX 01 2.01 1	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.050.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.050.000	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.500.000	
X XX 01 2.01 6	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.050.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Laporan	6.050.000	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Laporan	5.000.000	

X	XX	01	2.01	6	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
								Input :								Input :					
								- Bel. Pegawai :	-							- Bel. Pegawai :	-				
								- Bel. Barang & Jasa :	6.050.000							- Bel. Barang & Jasa :	5.000.000				
								- Bel. Modal Dana :	-							- Bel. Modal Dana :	-				
								Output :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		6.050.000				Output :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		5.000.000	
								Outcome :	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Outcome :	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
X	XX	01	2.01		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%		2.429.053.916	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%		2.037.574.016			
X	XX	01	2.01	1	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Input :				2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Input :						
								- Bel. Pegawai :	1.972.574.016							- Bel. Pegawai :	1.972.574.016				
								- Bel. Barang & Jasa :	-							- Bel. Barang & Jasa :	-				
								- Bel. Modal Dana :	-							- Bel. Modal Dana :	-				
								Output :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 orang/bln		1.972.574.016				Output :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 orang/bln		1.972.574.016	
								Outcome :	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							Outcome :	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				
X	XX	01	2.01	02	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Input :				2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Input :						
								- Bel. Pegawai :	-							- Bel. Pegawai :	-				
								- Bel. Barang & Jasa :	410.480.400							- Bel. Barang & Jasa :	25.000.000				
								- Bel. Modal Dana :	-							- Bel. Modal Dana :	-				
								Output :	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		410.480.400				Output :	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		25.000.000	
								Outcome :	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Outcome :	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
X	XX	01	2.01	03	2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Input :				2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Input :						
								- Bel. Pegawai :	-							- Bel. Pegawai :	-				
								- Bel. Barang & Jasa :	45.999.500							- Bel. Barang & Jasa :	40.000.000				
								- Bel. Modal :	-							- Bel. Modal :	-				

X	XX	01	2.05	9	4,3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 18.150.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	18.150.000	4,3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	15.000.000	
X	XX	01	2.06		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	179.699.278	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	173.600.000	
X	XX	01	2.06	1	5,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.831.548 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	8.831.548	5,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	7.000.000	
X	XX	01	2.06	2	5,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.651.146 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	10.651.146	5,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	10.000.000	
X	XX	01	2.06	3	5,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 9.093.876 - Bel. Modal Dana : -			5,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal Dana : -			

[illegible]

X	XX	01	2.06	9	5,8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 82.062.805 - Bel. Modal Dana : Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.062.805	5,8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 82.000.000 - Bel. Modal Dana : Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Outcome : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	82.000.000	
X	XX	01	2.07		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	128.703.070	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	115.000.000	
X	XX	01	2.07	1	6,1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 25.000.000 - Bel. Modal Dana : Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Outcome : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	25.000.000	6,1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 25.000.000 - Bel. Modal Dana : Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Outcome : Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	25.000.000	
X	XX	01	2.07	5	6,2	Pengadaan Mebelair		Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 34.716.909 - Bel. Modal Dana : Output : Jumlah Paket Mebel yang disediakan Outcome : Tersedianya Mebel	2 Unit	34.716.909	6,2	Pengadaan Mebelair		Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 35.000.000 - Bel. Modal Dana : Output : Jumlah Paket Mebel yang disediakan Outcome : Tersedianya Mebel	2 Unit	35.000.000	
X	XX	01	2.07	6	6,3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 33.767.470 - Bel. Modal Dana : Output : Outcome :		33.767.470	6,3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - Bel. Barang & Jasa : 30.000.000 - Bel. Modal Dana : Output : Outcome :		30.000.000	

X	XX	01	2.07	10	6,4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Output :	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit						Output :	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit				
								Outcome :	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						Outcome :	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						
								Input :							Input :							
								- Bel. Pegawai	-						- Bel. Pegawai	-						
X	XX	01	2.07	11	6,5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Bel. Barang & Jasa	-							- Bel. Barang & Jasa	-					
								- Bel. Modal							- Bel. Modal							
								Dana	35.218.691						Dana	25.000.000						
								Output :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.218.691				Output :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000				
								Outcome :	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Outcome :	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
								Input :							Input :							
								- Bel. Pegawai	-						- Bel. Pegawai	-						
								- Bel. Barang & Jasa	-						- Bel. Barang & Jasa	-						
								- Bel. Modal								- Bel. Modal						
								Dana	20.550.000						Dana	20.550.000						
								Output :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.550.000				Output :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.550.000				
								Outcome :	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Outcome :	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
X XX 01 2.08					7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia			100%	47.860.606	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia			100%	45.500.000		
X	XX	01	2.08	2	7,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input :								Input :						
								- Bel. Pegawai	-							- Bel. Pegawai	-					
								- Bel. Barang & Jasa	38.785.606							- Bel. Barang & Jasa	38.000.000					
								- Bel. Modal	-						- Bel. Modal	-						
								Dana								Dana						
								Output :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.785.606				Output :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.000.000				
								Outcome :	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Outcome :	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
								Input :							Input :							
X	XX	01	2.08	3	7,2	Penyediaan Jasa							7,2	Penyediaan Jasa								

					Peralatan dan Perlengkapan Kantor		- Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa : 9.075.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	9.075.000		Peralatan dan Perlengkapan Kantor		- Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	7.500.000		
X	XX	01	2.09		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	199.738.766	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	100%	199.600.000	
X	XX	01	2.09	1	8,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa : 151.288.841 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Outcome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	151.288.841	8,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa : 150.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Outcome : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	150.000.000	
X	XX	01	2.09	5	8,1	Pemeliharaan Mebel		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa : 9.075.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Mebel yang Dipelihara Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4 Unit	9.075.000	8,1	Pemeliharaan Mebel		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Mebel yang Dipelihara Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4 Unit	7.500.000	
X	XX	01	2.09	6	8,2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa : 12.100.000 - Bel. Modal Dana : -		12.100.000	8,2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa : 12.100.000 - Bel. Modal Dana : -		12.100.000	

			Output : Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	19.231.087			Output : Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	20.000.000	
	1,2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Outcome : Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Outcome : Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
			Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa 101.229.205 - Bel. : Modal Dana : -			1,2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa 75.000.000 - Bel. : Modal Dana : -			
			Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	101.229.205			Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	75.000.000	
			Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan		Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	100%		2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan		Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)	100%		
	2,1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa 12.100.000 - Bel. : Modal Dana : -	12 Laporan	12.100.000	2,1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa 10.000.000 - Bel. : Modal Dana : -	12 Laporan	10.000.000	
			Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan					Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan			
			Outcome : Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Outcome : Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Prosentase Realisasi PBB-P2	100%		3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Prosentase Realisasi PBB-P2	100%		

				3,1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 12.100.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan Outcome : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12.100.000		3,1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan Outcome : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		10.000.000	
7	01	03		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tosari	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	511.301.451		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tosari	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	582.100.000	
7	01	03	2.01	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%			1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		
7	01	03	2.01	02	1,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 8.307.250 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarakatan Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		8.307.250		1,1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 7.500.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarakatan Outcome : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7.500.000		
7	01	03	2.01	03	1,2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 40.350.325 - Bel. Modal Dana : -		40.350.325		1,2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 40.000.000 - Bel. Modal Dana : -		40.000.000		

			Output : Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan				Output : Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		
			Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 orang	16.050.000	2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	100 orang	16.050.000	
	2,1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Input : - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa - Bel. Modal Dana - 6.050.000 -	50 Keluarga	6.050.000	2,1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Input : - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa - Bel. Modal Dana - 6.050.000 -	50 Keluarga	6.050.000	
	2,2	penumbuhan kesadaran keluarga dalam peingkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Input : - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa - Bel. Modal Dana - 5.000.000 -	50 Keluarga	5.000.000	2,2	penumbuhan kesadaran keluarga dalam peingkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Input : - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa - Bel. Modal Dana - 5.000.000 -	50 Keluarga	5.000.000	
	2,3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Input : - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa - 5.000.000			2,3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Input : - Bel. Pegawai - Bel. Barang & Jasa - 5.000.000			

[illegible]

			Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatHarmonisasi	8 Laporan				Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatHarmonisasi	8 Laporan		
			Outcome : Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Outcome : Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tosari	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	94.100.000	5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tosari	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	112.000.000	
	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%		1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%		
	1,1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa 12.100.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Org	12.100.000	1,1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. : Barang & Jasa 30.000.000 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Org	30.000.000	
			Outcome : Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Outcome : Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tosari	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	41.000.000	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tosari	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	41.000.000	
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%		1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	100%		
	1,1	Fasilitasi Penyusunan Paraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dihasilkan 10 Dokumen Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		6.000.000	1,1	Fasilitasi Penyusunan Paraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dihasilkan 10 Dokumen Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		6.000.000	
	1,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Laporan Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10.000.000	1,2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Laporan Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10.000.000	
	1,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa 12 Laporan Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		10.000.000	1,3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal Dana : - Output : Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa 12 Laporan Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		10.000.000	
	1,4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : -			1,4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000 - Bel. Modal : -			

			Dana					Dana				
			Output : Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	15 Dokumen	10.000.000			Output : Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	15 Dokumen	10.000.000		
			Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Outcome : Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
	1,5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Input :					Input :				
			- Bel. Pegawai		-			- Bel. Pegawai		-		
			- Bel. Barang & Jasa		5.000.000			- Bel. Barang & Jasa		5.000.000		
			- Bel. Modal		-			- Bel. Modal		-		
			Dana					Dana				
			Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Dokumen	5.000.000			Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Dokumen	5.000.000		
			Outcome : Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					Outcome : Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional*

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Tosari sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tosari adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset ;
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;
7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik
- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.

- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan stratejik ini, maka Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepiritual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan”** dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan.

Sedangkan Sasaran stratejik Kecamatan Tosari merupakan bagian integral dalam proses prancanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran

yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat di capai.

Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tosari merupakan Sinkronisasi dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana dapat dilihat pada tabel 3.2A dan tabel 3.2B di bawah ini:

Tabel 3.2A
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2026

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
TUJUAN					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	2,71	3,00	3,25
SASARAN					
1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Hasil Capaian Penyelenggaraan Kecamatan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerahh	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,75	73,00	74,00

Tabel 3.2.B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPJMD dan IKU

Indikator Sasaran RPJMD			Indikator Kinerja Utama (IKU)			Program
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Pelayanan Publik		3,25	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Berdasarkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil pengukuran yang di peroleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelengga Pelayanan Publik (PEKPPP). Instrumen PEKPPP terdiri dari 3 (tiga) formulir yaitu: 1. Formulir F-01 : merupakan formulir self-assesment yang diisi oleh unit kerja Lokus, (Tidak dilakukan Pembobotan) Jumlah Pertanyaan 30 pertanyaan. 2. Formulir F-02 : merupakan formulir penilaian yang diisi oleh evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk..... 3. Formulir F-03 : merupakan formulir penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima layanan, untuk menerima data persepsi, bobot 25%, jumlah pertanyaan 14 pertanyaan.	3,25	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

3.3.2 Program, kegiatan dan subkegiatan pendukung prioritas daerah tahun 2026

Dari rumusan tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tosari Tahun 2026, ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas daerah tahun 2026, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3.2 di bawah ini:

Tabel 3.3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
sementara dikosongi	Hilirisasi Industri dan Pengolahan Potensi Unggulan Daerah untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	PPD 4 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Peningkatan pelaksanaan kebijakan daerah di kecamatan dan desa	Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.3.3 Program, kegiatan dan subkegiatan pendukung 33 prioritas

Kecamatan Tosari mendukung 33 prioritas Bupati Pasuruan yaitu UMK naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah dengan menggunakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Matrik 33 Program Prioritas Bupati pada Renja PD Kecamatan Tosari 2026

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DB/HEHT/ disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pembangunan pasuruan coaching and creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekraf dan sertifikasi produk unggulan/produk UMKM	Kecamatan Tosari	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	3.000.000	DAU		8 desa	Kec. Tosari	
2	UMK naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.000.000	DAU		8 Desa	Kec. Tosari	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 serta implementasi rencana program/kegiatan tahun anggaran 2026 sebagaimana pada table 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Tosari Tahun 2026 dan Prakiraan maju 2027 berikut

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

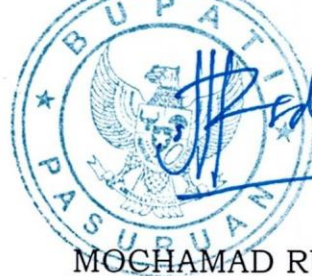
1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO